



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HAMIDAH NAYATI UTAMI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **677136**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.700.000.000**

1. Tanah Seluas 106 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah Seluas 99 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 139 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/179 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 335.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA STATION WAGON Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 674.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 30.000.000

Sub Total Rp. 4.739.200.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.739.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.